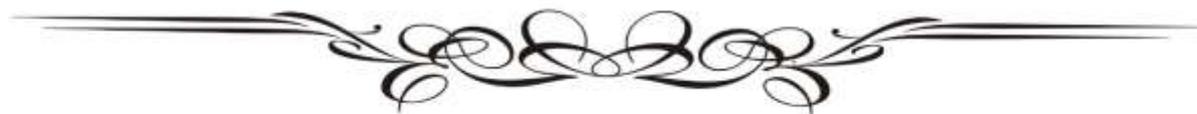


KLIPPING BERITA MEDIA MASSA



Kamis, 18 Juli 2019



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Kompas (Hal. 1)	Kamis, 18 Juli 2019	Berita Foto	Warga mengambil air dari ceruk di dasar sungai di Dusun Glagah, Desa Dukuh, Jawa Tengah, Rabu (17/7). Musim kemarau ini warga sempat kesulitan mencari air bersih.
2	Kompas (Hal. 14)	Kamis, 18 Juli 2019	Berita Foto	Pengunjung melihat-lihat produk yang dihadirkan dalam pameran dan forum teknologi industri air dan limbah di JCC, Rabu (17/7)
3	Kompas (Hal. 18)	Kamis, 18 Juli 2019	Tegakan Aturan Tata Ruang	Konflik lahan antara Kemenkum HAM dan Pemkot Tangerang membuka mata bahwa kasus serupa bisa terjadi di daerah lain. Penegakan aturan Tata Ruang bisa menjadi jalan keluar
4	Kompas (Hal. 18)	Kamis, 18 Juli 2019	Kemarau, Krisis Air Bersih Diantisipasi	Jakarta diprediksi memasuki puncak kemarau antara Agustus dan September. Krisis air bersih diprediksi akan terjadi di sebagian kawasan Jakarta Barat.
5	Bisnis Indonesia (Hal. 4)	Kamis, 18 Juli 2019	Opini	Sejuta Harapan di Tanah Borneo
6	Bisnis Indonesia (Hal. 4)	Kamis, 18 Juli 2019	Kontraktor Daerah Dilibatkan di Mandalika	Kementerian PUPR mendorong agar kontraktir daerah bisa bersaing dalam tender dengan BUMNKarya di proyek jalan.
7	Bisnis Indonesia (Hal. 4)	Kamis, 18 Juli 2019	Adhi Karya Memulai dari Jateng	Proyek pembangunan tol Sol-Yogyakarta akan dimulai dari Jawa Tengah, yakni ruas Kartasura-Prambanan dengan panjang utama 35,18 KM
8	Media Indonesia (Hal. 1)	Kamis, 18 Juli 2019	Kekeringan kian Meluas Tujuh Provinsi Terdampak	Sebanyak 102.746 ha sawah di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dilanda kekeringan. Bahkan, dari luas itu sebanyak 9.940 gagal panen
9	Media Indonesia (Hal. 1)	Kamis, 18 Juli 2019	Kota Cerdas Terwujud Berkat Pemimpin Cerdas	Teknologi menunjang terwujudnya kota cerdas, namun yang menentukan adalah kualitas pemimpin yang cerdas

Judul	Berita Foto	Tanggal	Kamis, 18 Juli 2019
Media	Kompas (Hal. 1)		
Resume	Warga mengambil air dari ceruk di dasar sungai di Dusun Glagah, Desa Dukuh, Jawa Tengah, Rabu (17/7). Musim kemarau ini warga sempat kesulitan mencari air bersih.		

Krisis Air Bersih di Sragen



KOMPAS/BERGANATA INDRA RIATMOKO

Warga mengambil air dari ceruk di dasar sungai di Dusun Glagah, Desa Dukuh, Tangen, Sragen, Jawa Tengah, Rabu (17/7/2019). Setiap musim kemarau, warga setempat kesulitan memperoleh air bersih. Air yang diperoleh dari ceruk tersebut digunakan untuk keperluan mandi dan mencuci. Warga harus membeli air bersih dengan harga Rp 5.000 per galon ukuran 19 liter untuk air minum. Mereka berharap pemerintah segera mengirimkan bantuan air bersih.

Judul	Berita Foto	Tanggal	Kamis, 18 Juli 2019
Media	Kompas (Hal. 14)		
Resume	Pengunjung melihat-lihat produk yang dihadirkan dalam pameran dan forum teknologi industri air dan limbah di JCC, Rabu (17/7)		

Pameran Indo Water 2019



KOMPAS/ALIF ICHWAN

Pengunjung melihat-lihat produk yang dihadirkan dalam pameran dan forum teknologi industri air dan limbah, Indo Water Expo & Forum, di Jakarta Convention Center, Rabu (17/7/2019). Mengutip laman kegiatan, sekitar 550 peserta pameran dari 30 negara berpartisipasi dalam pameran dan forum yang berlangsung sampai dengan Jumat (19/7).

Judul	Tegakan Aturan Tata Ruang	Tanggal	Kamis, 18 Juli 2019
Media	Kompas (Hal. 18)		
Resume	Konflik lahan antara Kemenkum HAM dan Pemkot Tangerang membuka mata bahwa kasus serupa bisa terjadi di daerah lain. Penegakan aturan Tata Ruang bisa menjadi jalan keluar		

KONFLIK LAHAN

Tegakkan Aturan Tata Ruang

TANGERANG, KOMPAS — Konflik lahan antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Kota Tangerang membuka mata bahwa kasus serupa bisa terjadi di daerah lain. Sebagai sesama instansi pemerintah, kementerian dan pemerintah kota diharapkan bersandar pada aturan dan menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Jangan sampai sebagai sesama pelayan publik justru mengumbar ego sektoral dan merugikan rakyat.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng, Rabu (17/7/2019), mengatakan, prinsip utama dalam penerapan otonomi daerah adalah tata ruang. Polemik yang terjadi antara daerah otonom dan lembaga sektoral atau kementerian/pemerintah pusat adalah puncak gu-

nung es yang sewaktu-waktu mencair.

"Peruntukan (lahan) ini dapat dilihat dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) suatu daerah dan dalam rencana detail tata ruang (RDTR). Dalam prinsip otonomi, hal-hal yang tidak sesuai atau tidak berbasis pada tata ruang, tidak sesuai dengan peruntukan, tidak boleh terjadi," tuturnya.

Dalam sebuah daerah otonom, menurut Endi, tata ruang menjadi basis pegangan pemerintah setempat.

"Pemerintah daerah otonom memiliki kewenangan mengatur peruntukan lahan wilayahnya. Ini prinsip otda (otonomi daerah). Kalau tidak sesuai peruntukan, siapa pun tidak bisa memaksakan suatu pembangunan atau investasi di daerah itu," ujar Endi.

Ia berharap kementerian terkait harus mendesak agar

semua daerah di Indonesia memiliki RDTR dan RTRW. "Dari 542 daerah se-Indonesia, hanya 52 daerah yang sudah memiliki RDTR. Masih kecil," kata Endi.

Hal senada sebelumnya diungkapkan oleh pemerhati masalah perkotaan dari Universitas Trisakti, Jakarta, Nirwono Joga.

Perseteraan antara Pemkot Tangerang dan Kemenkumham memanas serta menyita perhatian publik setelah Pemkot menyegel Kampus Politeknik Ilmu Pemasaryakatan dan Politeknik Imigrasi di Jalan Satria Sudirman, Kelurahan Tanah Tinggi, yang berada di lahan Kemenkumham. Penyegehan dilakukan karena kedua politeknik belum memiliki izin mendirikan bangunan dan peruntukan lahan, sesuai aturan yang berlaku, masih sebagai lahan pertanian. (PIN)

Judul	Kemarau, Krisis Air Bersih Diantisipasi	Tanggal	Kamis, 18 Juli 2019
Media	Kompas (Hal. 18)		
Resume	Jakarta diprediksi memasuki puncak kemarau antara Agustus dan September. Krisis air bersih diprediksi akan terjadi di sebagian kawasan Jakarta Barat.		

Kemarau, Krisis Air Bersih Diantisipasi

Jakarta diprediksi memasuki puncak musim kemarau antara Agustus dan September. Kekeringan berujung krisis air bersih berpotensi terjadi, antara lain, di sebagian Jakarta Barat.

JAKARTA, KOMPAS — Kepala Subbidang Analisis dan Informasi Iklim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Adi Ripaldi saat dihubungi di Jakarta, Rabu (17/7/2019), mengatakan, Jakarta sudah memasuki kemarau sejak akhir Mei 2019.

Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), ada beberapa wilayah di Jakarta Utara yang sudah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Adapun di kawasan Jakarta lain, seperti Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur, rata-rata 31-60 hari tanpa hujan.

"Puncak kemarau di Jakarta Utara diprediksi akan datang lebih awal pada Agustus. Wilayah lainnya sekitar September," ujar Adi.

Saat kemarau, suhu minimum di DKI 23-24 derajat celsius dan maksimum 33-35 derajat celsius. Adi menjelaskan, kondisi musim kemarau didominasi cuaca cerah dengan sedikit awan yang menutupi langit Jawa, khususnya Jakarta.

Oleh karena itu, cuaca pada siang hari akan terasa lebih panas, tetapi menciptakan suhu dingin pada malam hari. "Pasalnya, di waktu malam, pelepasan panas bumi ke atmosfer tak lagi terjebak oleh awan yang menutupi langit," kata Adi.

Antisipasi kekeringan

BMKG, lanjut Adi, akan terus

memantau curah hujan di DKI sehingga potensi kekeringan dapat terpetakan untuk mengetahui wilayah yang berisiko mengalami krisis air bersih.

"Kekeringan di wilayah DKI kemungkinan besar akan berdampak pada ketersediaan kebutuhan air bagi masyarakat yang menggunakan sumur dangkal," kata Adi.

Secara terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta Subejo mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait wilayah yang mengalami kekeringan dan krisis air bersih.

Namun, jika berkaca pada tahun 2015, setidaknya ada dua kelurahan di Jakarta Barat yang harus diantisipasi dari bahaya kekeringan dan krisis air bersih, yakni Kelurahan Tegal Alur dan Kamal di Kalideres.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait, misalnya aparat wilayah, agar memonitor potensi dampak kekeringan, seperti krisis air bersih, dan segera laporkan untuk direspons cepat," ujar Subejo.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini Yusuf mengatakan, pihaknya akan menambah pasokan air bersih ke daerah yang membutuhkan. Penyediaan air bersih akan melibatkan PD PAM Jaya selaku BUMD penyedia air bersih.

"Nanti mereka akan menyiapkan tangki-tangki air bersih

atau dengan truk-truk tangki untuk disalurkan langsung ke masyarakat. Kiriman dari PD PAM Jaya itu gratis kalau memang situasi sudah rawan," tutur Juaini.

Debit air mengecil

Di Kelurahan Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, debit air leding sudah dirasakan berkurang oleh warga. Warga terpaksa membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mandi dan memasak.

Salah seorang warga, Wandy (45), mengatakan, sudah sekitar satu bulan debit air leding berkurang. "Sekarang kalau menampung air di ember ukuran 25 kilogram, butuh waktu sekitar 15 menit," keluh lelaki asal Indramayu, Jawa Barat, itu.

Untuk kebutuhan sehari-hari, dia membeli air bersih dari pedagang air sebanyak lima jeriken. Setiap jeriken Rp 3.000. "Terpaksa harus beli air karena saya dan istri setiap hari kerja. Jadi, enggak mungkin tunggu seharian untuk penuh bak air," ujar Wandy.

Fiky (50), pedagang air dengan gerobak di Kedoya, Jakarta Barat, mengatakan, setiap kemarau, permintaan air bersih selalu meningkat. "Sudah dua minggu, setiap hari warga bisa minta sampai 50 jeriken. Kalau hari-hari biasa, paling 30 jeriken. Harga sama saja, satu jeriken ukuran 35 liter Rp 3.000," kata Fiky. (BOW)

Judul	Opini	Tanggal	Kamis, 18 Juli 2019
Media	Bisnis Indonesia (Hal. 4)		
Resume	Sejuta Harapan di Tanah Borneo		

Sejuta Harapan di Tanah Borneo

Dina Irawan
dina.irawan@bisnis.com

Sebelum meninggal
Bandara Samsudin Noor,

Presiden Joko Widodo tiba-tiba bertanya kepada Sahbirtin Noor, Gubernur Kalimantan Selatan.

"Pak Gub [gubernur] ada sekitar tanah 300.000 hektare," tanya kepala negara.

Samsudin terkejut dengan pertanyaan kepala negara itu. Dalam hati, dia hanya meneka-neka maksud Presiden. "Pak Presiden mau berkebuduk atau [membuka] tambang?"

Presiden pun menjelaskan bahwa Kalsel dipersiapkan sebagai salah satu alternatif ibu kota negara. Setelah itu, Sahbirtin bergegas memerintahkan jajarannya untuk mencari lahan seluas itu.

"Akhirnya kami temukan, tetapi ada dua titik kami siapkan. Dari segi kewilayahan *hsyru Allah* tersedia," ujarnya.

Persiswa tersebut terpadat pada 2017 silam, sesuai Presiden mengunjung Tanah Borneo dalam rangkaian kunjungan kerja.

Sahbirtin menceritakan pengalamannya saat menjadi pembicara di dialog nasional bertajuk Menuju Ibu Kota *Masa Depan: Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable* di Novotel Banjarmasin

ru, Kalimantan Selatan, belum lama ini.

Selain tengah dan timur, kawasan Kalimantan bagian selatan termasuk dalam kandidat calon ibu kota negara. Belakangan nama Kalimantan mengemuka ke publik, setelah rencana pemerintahan diputuskan oleh pemerintah berada di luar Pulau Jawa.

Sejarah mencatat, Kalimantan bukanlah kandidat baru calon ibu kota.

Pada awal kemerdekaan, Presiden Soekarno sempat mewacanakan ibu kota pindah ke Palangkaraya. Kalieng. Namun urung terlaksana, hingga sang proklamator lengser dari jabatannya.

"Pemindahan ibu kota sudah pasti akan di Kalimantan. Di mana pun ibu kota baru akan dibangun, dampaknya ke seluruh Kalimantan akan signifikan," ujar Deputy Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawitradhata dalam dialog tersebut.

Pulau yang memiliki nama lain Borneo ini dinilai memenuhi sejumlah kriteria menjadi ibu kota baru. Antara lain, lokasinya strategis karena secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia.

Kendungan, ketersediaan lahan milik pemerintah atau badan usaha milik negara di wilayah ini juga cukup luas, sehingga dapat menunjang biaya investasi untuk mendirikan infrastruktur

tur penunjang.

"Tersedia juga sumber daya air cukup dan bebas pencemaran lingkungan," katanya.

Kelahiran lain, Kalimantan juga terbebas dari bencana gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami.

Meskipun demikian, Rudy tak menampilkan bila pulau ini juga memiliki persoalan seperti banjir, ketbakakan hutan, dan lahan gambut.

Sebaliknya di Pulau Jawa, kriteria-kriteria tersebut cukup sulit terpenuhi. Rudy mengatakan, pertumbuhan penduduk di Jakarta dan kota penyangganya sangat tinggi. Begitu pula dengan penurunan permukaan air tanah.

Ketersediaan air bersih juga menjadi persoalan. Di Jakarta telah terjadi penurunan permukaan air tanah, lantaran penyediaan air tanah sangat tinggi.

"Kalau ada bocor dari *septic tank* bahaya [bisa] tercemar ke air tanah. Itulah kenapa diputuskan pindah ke-luar Jawa," katanya.

Saat bersamaan, konversi lahan di Jawa juga sangat tinggi. Akibatnya, tak banyak tersedia lahan yang cukup untuk dibangun ibu kota baru. Jawa juga rentan, karena dilintasi oleh cincin api, sehingga rawan gempa, letusan gunung api, dan tsunami. Dari aspek perkomnitan, selama ini Indonesia sangat bergantung pada

Pulau Jawa. Tercemin dari produk domestik regional bruto (PDRB) yang mencapai 58,48%. Sedangkan di pulau lain seperti Kalimantan hanya 8,20%, Sumatra 21,58%, dan Sulawesi 6,22%.

Oleh sebab itu Kepala Negara menginginkan pembangunan perekonomian mengarah ke Timur Indonesia, karena potensinya sangat besar.

"Jawa sentris tak terpadat lagi [bila ibu kota dipindah ke luar Pulau Jawa]," ujarnya.

ARUS PERDAGANGAN

Berdasarkan kajian Bappenas, lebih dari 50% wilayah Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan, apabila ibu kota negara dipindah ke provinsi yang memiliki konektivitas dengan provinsi lain.

Dalam hal ini, Rudy mengatakan ekonomi Kalimantan relatif paling bagus di antara kandidat lain, karena letaknya strategis di wilayah tengah Indonesia.

Dia menambahkan, jika jadi ibu kota di Kalimantan, maka berpotensi meningkatkan arus perdagangan antarpulau.

"Contoh Kalimantan kalau mau membeli bahan bangunan dari Sulawesi, sedangkan barang-barang lainnya dari Surabaya. Jika menjadi ibu kota, maka arus perdagangannya akan lebih

tinggi. Diharapkan pindah [ibu kota] ke Kalimantan akan lebih seimbang [perdagangan antarpulau]," ujarnya.

Hal lainnya yang menjadi keunggulan adalah, jika nantinya salah satu provinsi di Kalimantan menjadi ibu kota, maka provinsi tersebut tidak hanya mengandalkan pendapatan dari sumber daya alam, melainkan juga investasi.

Selama ini, ekonomi kawasan Borneo terlalu tergantung dengan sumber daya alam. Jika menjadi ibu kota, maka akan banyak pelaku usaha yang berinvestasi di kawasan ini, baik sektor manufaktur, pariwisata, kuliner, maupun sektor jasa lainnya.

Gubernur Kalsel Sahbirtin mengatakan, pemilihan ibu kota ke Kalimantan merupakan keputusan tepat karena wilayah ini memiliki posisi strategis.

Kalsel, kata dia, memiliki alur laut kepulauan Indonesia. Kendati begitu, dia tidak mempersiapkan jika nantinya Presiden memilih Kalimantan Tengah atau Kalimantan Timur.

Bagi Sahbirtin, jika ibu kota di Kalimantan maka akan meningkatkan perekonomian pulau secara keseluruhan, dan mengisigma Jawa sentris yang bertahan selama puluhan tahun.

"Kalimantan tidak hanya milik bangsa Kalimantan, tetapi milik Sumatra, Aceh, Jawa, dan lainnya."

Judul	Kontraktor Daerah Dilibatkan di Mandalika	Tanggal	Kamis, 18 Juli 2019
Media	Bisnis Indonesia (Hal. 4)		
Resume	Kementerian PUPR mendorong agar kontraktir daerah bisa bersaing dalam tender dengan BUMN Karya di proyek jalan.		

Kontraktor Daerah Dilibatkan di Mandalika

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendorong agar kontraktor daerah bisa bersaing dalam tender dengan BUMN Karya di proyek jalan elak dari bandara ke Mandalika, Lombok.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Sugiyartanto mengatakan bahwa banyak kontraktor yang sudah tertarik berinvestasi dalam pembangunan jalan elak ini. "Pasti banyak lah. Nanti kan melalui tahap pra kualifikasi.

Nanti proyek itu panjangnya 17 km dan terdiri dari empat lajur," tuturnya di Jakarta, Rabu (17/7).

Sugiyartanto menuturkan bahwa kontraktor daerah akan dilibatkan dalam proses prakualifikasi ini karena kesempatannya yang lebih besar. "Daerah kualifikasinya bisa lebih tinggi dari sisi kemampuan keuangan. Bukan tidak mungkin perusahaan itu akan jadi *lead*-nya bukan hanya BUMN," katanya. *(Krizia Putri K)*

Judul	Adhi Karya Memulai dari Jateng	Tanggal	Kamis, 18 Juli 2019
Media	Bisnis Indonesia (Hal. 4)		
Resume	Proyek pembangunan tol Sol-Yogyakarta akan dimulai dari Jawa Tengah, yakni ruas Kartasura-Prambanan dengan panjang utama 35,18 KM		

Adhi Karya Memulai dari Jateng

Bisnis, SEMARANG — Proyek pembangunan tol Solo-Yogyakarta akan dimulai dari Jawa Tengah, yakni ruas Kartasura-Prambanan dengan panjang jalan utama 35,18 Km.

Ruas itu masuk seksi satu dan terdapat empat *exit* tol, di Kartasura, Karangnom/Delanggu, Klaten dan Prambanan-Manisrenggo.

Perwakilan dari PT Adhi Karya, Pristi Wahyono mengatakan, diperlukan pembebasan lahan seluas 608,90 hektare. Sebagian besar lahan yang ada berupa sawah sebesar 73,91%. Untuk permukiman penduduk yang terkena proyek tol sebesar 17,54%, kebun atau tegalan 1,55%, serta 7,09% adalah lahan lain-lain, seperti tanah wakaf, dan tanah milik TNI.

“Kita sudah sosialisasi ke daerah beberapa kali. Investasi ini perlu proses panjang. Dari pertama kami melakukan evaluasi dan kajian dampak analisis lingkungan, dan sampai saat ini kami masih melakukan kajian, hingga sekarang kita sampai pada pengajuan penetapan lokasi,” katanya, Rabu (17/7).

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono menjelaskan, sebelum masuk tahap kegiatan lelang yang ditargetkan pada akhir Juli 2019, penetapan lokasi harus sudah tepat. Tol Solo-Yogya secara administrasi melewati tiga kabupaten,

14 kecamatan dan 61 desa.

Tiga kabupaten yang dilewati tersebut adalah Kabupaten Karanganyar, Boyolali dan Klaten. Kecamatan terbanyak yang dilintasi tol berada di Kabupaten Klaten, yakni sebanyak 11 kecamatan, antara lain Delanggu, Karangnom, Polanharjo, Klaten Utara, dan Ceper.

“Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman di kabupaten, yang pertama coba dicek tata ruangnya. Kalau tata ruangnya belum ok, tentu jadi persoalan,” jelasnya.

Sekda juga meminta ada pengecekan lahan yang terkena dampak tol.

Drainase terutama di *underpass*, katanya, juga harus menjadi perhatian. Jika tidak diperhatikan elevasinya, akan menimbulkan banjir. Itu sudah terjadi di *underpass* Pajang, Kartasura. Hal-hal lain yang tak kalah penting adalah sumber-sumber air, situs yang harus dipertahankan, dan kepemilikan lahan lainnya.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah Peni Rahayu memberikan penegasan mengenai LP2B karena berkaitan dengan alokasi pemberian pupuk bersubsidi.

Bagi daerah yang LP2B terkena dampak pembangunan tol, wajib mencari lokasi cadangan. Prinsipnya, jangan sampai LP2B berkurang. (k28)

Judul	Kekeringan kian Meluas Tujuh Provinsi Terdampak	Tanggal	Kamis, 18 Juli 2019
Media	Media Indonesia (Hal. 1)		
Resume	Sebanyak 102.746 ha sawah di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dilanda kekeringan. Bahkan, dari luas itu sebanyak 9.940 gagal panen		

Kekeringan kian Meluas Tujuh Provinsi Terdampak

Sebanyak 102.746 ha sawah di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara dilanda kekeringan. Dari luas itu, 9.940 ha dinyatakan gagal panen.

INDRIYANI ASTUTI
indriyani@mediaindonesia.com

BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada tujuh provinsi di Indonesia yang telah mengalami kekeringan. Tujuh wilayah itu ialah Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Kepala Pelaksana Harian (Pih) Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Agus Wibowo merinci secara keseluruhan terdapat sebanyak 79 kabupaten/kota di tujuh provinsi tersebut yang mengalami kekeringan, meliputi 1.969 desa/kecamatan di 556 kecamatan.

Ia menyampaikan lebih jauh bahwa puncak kekeringan akan terjadi pada Agustus mendatang sebagaimana prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Oleh karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tujuh provinsi telah melakukan upaya peringatan guna mengantisipasi sebelum bencana kekeringan bertambah parah.

Upaya penanganan jangka pendek menghadapi kekeringan, terang Agus, antara lain melakukan pendistribusian air, pengadaan mobil tanki air, menambah hidran umum, dan membuat sumur bor.

"Usaha lain ialah hujan buatan atau modifikasi cuaca, termasuk kampanye hemat air," ucapnya, Rabu (17/7). Hujan buatan, imbuhnya, merupakan perintah Presiden Joko Widodo dalam



KESULITAN AIR BERSIH: Warga mengambil air dari lubang yang digali di dasar sungai yang kering di Desa Glagah, Tangger, Sragen, Jawa Tengah, Selasa (16/7). Warga kesulitan mendapatkan air bersih sejak dua bulan terakhir sehingga mereka memanfaatkan sumber air dari dasar sungai untuk keperluan rumah tangga.

Daerah Terdampak Kekeringan 2019

1 Jawa Barat • 42 kecamatan • 12 kabupaten	5 Bali • 25 desa • 12 kecamatan • 2 kabupaten
2 Jawa Tengah • 147 desa • 80 kecamatan • 18 kabupaten	6 NTB • 302 desa • 69 kecamatan • 9 kabupaten
3 DI Yogyakarta • 78 desa • 18 kecamatan • 1 kabupaten	7 NTT • 851 desa • 164 kecamatan • 15 kabupaten
4 Jawa Timur • 586 desa • 186 kecamatan • 24 kabupaten	



Strategi Penanganan Kekeringan 2019

Jangka Pendek	Jangka Menengah/Panjang
<ul style="list-style-type: none"> • Mengedrop air bersih • Menambah jumlah mobil tangki • Menambah hidran umum • Membuat sumur bor • Membuat hujan buatan • Melakukan kampanye hemat air • Memberi bantuan dana siap pakai 	<ul style="list-style-type: none"> • Merevitalisasi dan mereforestasi DAS • Merevitalisasi danau • Membuat embung dan sumur bor permanen • Membangun waduk • Mengendalikan pemanfaatan air tanah • Memperbaiki saluran irigasi • Melakukan pemetaan • Membuat biopori • Memberi bantuan bibit pohon bernilai ekologis-ekologis

Sumber: BNPB

rapat terbatas di istana negara beberapa waktu lalu.

Sementara itu, upaya penanganan kekeringan jangka pan-

jang, yaitu revitalisasi danau dan daerah aliran sungai, membangun waduk, perbaikan irigasi, pemetaan, biopori, dan pembuat-

an embung serta sumur permanen, termasuk pemberian pohon bernilai ekonomis dan ekologis yang bisa menampung resapan

air dalam tanah, seperti pohon sukun dan aren. Kekeringan juga berdampak pada meningkatnya risiko sebaran titik panas (*hotspot*) di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (*karhutla*).

Namun, data yang diambil dari Sipongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan sebaran luas *karhutla* pada 2019 menurun drastis mencapai 30.477 hektare.

Menurut Agus, itu disebabkan koordinasi penanganan *karhutla* semakin diperkuat dengan adanya siaga darurat bencana *karhutla*.

Berbagai daerah di Tanah Air juga melaporkan fenomena kekeringan yang kian meluas dan memburuk. Sejumlah daerah di Jawa Tengah, seperti Tegal, Klaten, melaporkan adanya fenomena itu. Demikian pula dengan sejumlah daerah di Jawa Barat dan Bali.

Efek berganda

Dalam kesempatan berbeda, Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Soetarto Alimoeso berpandangan bahwa fenomena kekeringan yang tengah terjadi saat ini akan membawa efek berganda pada sektor perberasan di Tanah Air.

Misalnya, jadwal puncak panen raya yang bergeser dari Maret ke April.

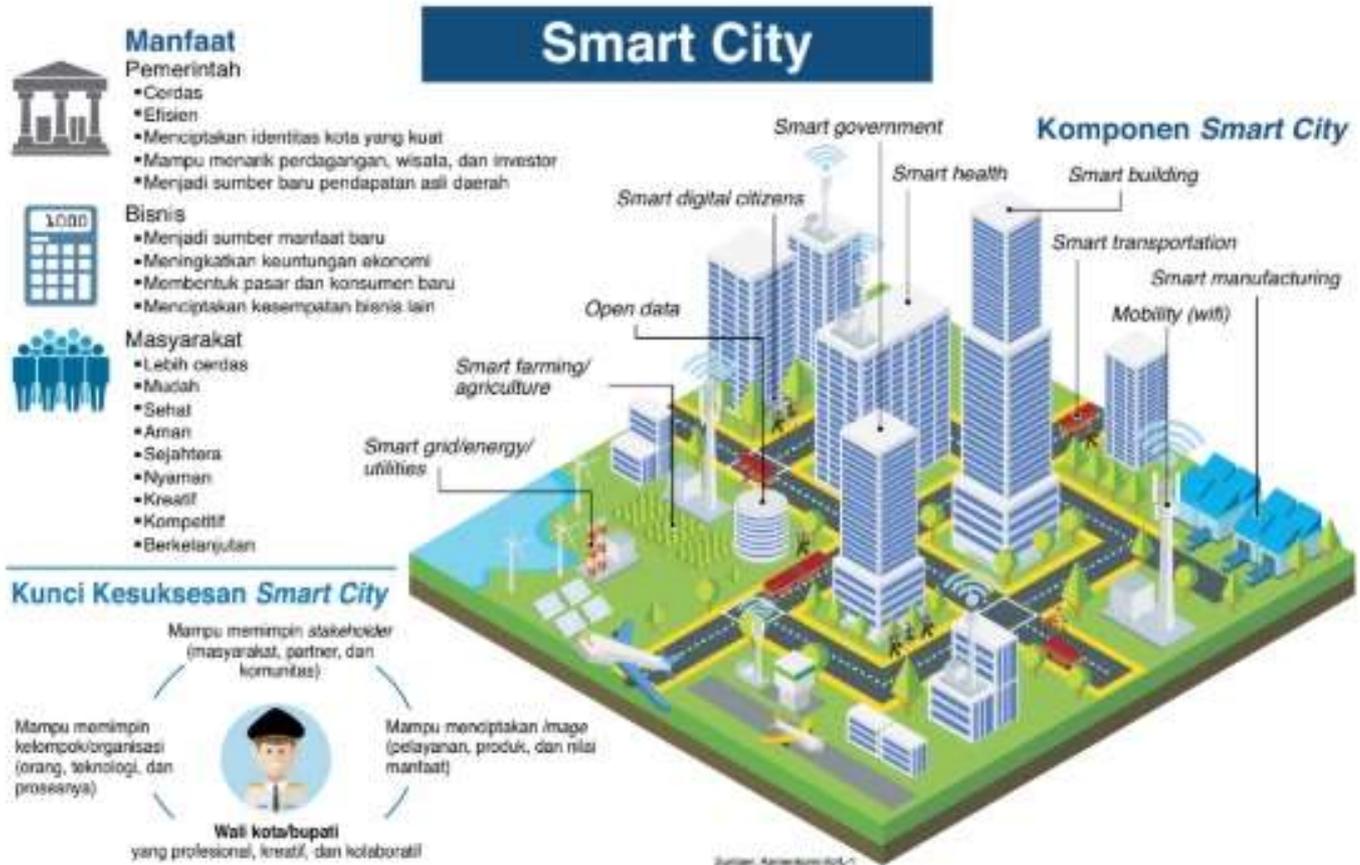
Dengan panen yang bergeser, otomatis kegiatan tanam pun bergerak ke Mei. Akhirnya, panen gada yang seharusnya terjadi pada September pun berpotensi mundur ke Oktober. Begitu pun untuk musim-musim tanam selanjutnya yang berpeluang semakin menjauh dari jadwal semestinya.

"Ini yang harus diperhitungkan sejak sekarang. Persediaan pangan terutama beras harus benar-benar diperhitungkan. Jangan sampai salah analisis hingga akhirnya membuat keputusan yang salah dan terjadi krisis pangan," ujar Soetarto, Rabu (17/7).

Merujuk data Kementerian Pertanian sudah seluas 102.746 ha lahan sawah di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara dilanda kekeringan. Dari luas itu, 9.940 ha telah dinyatakan puso atau gagal panen. "Angka itu semestinya bisa diminimalisasi jika Kementerian sudah melakukan antisipasi," (Pra/JI/AS/JS/BB/RS/BY/X-6)

Judul	Kota Cerdas Terwujud Berkat Pemimpin Cerdas	Tanggal	Kamis, 18 Juli 2019
Media	Media Indonesia (Hal. 1)		
Resume	Teknologi menunjang terwujudnya kota cerdas, namun yang menentukan adalah kualitas pemimpin yang cerdas		

0210



TEKNOLOGI

Kota Cerdas Terwujud Berkat Pemimpin Cerdas

WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengingatkan para kepala daerah agar jangan hanya terpukau dengan istilah kota cerdas (*smart city*) karena teknologi hanya merupakan alat, sedangkan yang memberi perbedaan ialah pengguna alat itu sendiri.

Jusuf Kalla mengingatkan bahwa teknologi tidak akan memiliki arti jika penggunaanya yang dalam hal ini kepala daerah tidak cerdas.

"Kota cerdas hanya dapat terealisasi oleh bupati atau wali kota yang cerdas. Apa pun peralatan maupun teknologinya, tanpa ada pemimpin yang cerdas tidak akan tercapai kota cerdas," tutur Jusuf Kalla dalam pembukaan Indonesia Internasional Smart City Expo and Forum 2019 di JCC, Jakarta, kemarin.

Oleh sebab itu, imbuh Wapres Kalla, *smart city* bukan diartikan sepenuhnya komputer di

kantor wali kota atau bupati. Meski teknologi dapat dibeli, kecerdasan untuk menggunakannya harus muncul dari kemampuan wali kota dan bupati untuk mengelola berbagai teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Teknologi itu dapat dibeli, tetapi inovasi dan kecerdasan itu berasal dari upaya dan kemampuan masing-masing. Oleh sebab itu, yang penting dikembangkan ialah wali kota dan warga kota yang cerdas," terang Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla menyebutkan tanpa ada masyarakat yang cerdas, *smart city* juga tidak akan terwujud sebab teknologi hanya sebatas alat. Dengan demikian, menurut Wapres, jangan hanya terpaku kepada teknologi, pemerintah daerah juga harus mencerdaskan warganya dan bersinergi untuk menciptakan kota yang cerdas.

"Walaupun segala macam peralatan ada, kalau

warga kota masih buang sampah dan melanggar lalu lintas seandainya maupun antrian tidak teratur, kota itu akan tidak cerdas," tutur Wapres Jusuf Kalla yang akrab disapa JK.

Konsep kota cerdas sendiri merupakan bagian dari upaya peningkatan ekonomi yang adil bagi masyarakat. Untuk itu, diperlukan inovasi dan inisiatif pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi masing-masing.

"Usaha pemerintah daerah untuk mengembangkan ekonomi daerah dan memberikan inisiatif tentu menjadi bagian yang penting untuk kemajuan kita semua. Meningkatkan kemakmuran yang adil, seluruh masyarakat dapat bagian dari kemajuan ekonomi, semua itu dapat terwujud melalui pemerintah daerah yang inisiatif dan inovatif. Itulah kota cerdas," tegas JK. (Dro/X-11)